

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Teori Kuznetz S (1955) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi pada tahap awal akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, setelah perubahan struktur ekonomi berjalan dengan sempurna dan diiringi dengan proses pembangunan, maka tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan menurun yang digambarkan dengan kurva hipotesis kuznet dengan bentuk U terbalik. Teori ini memberi gambaran makro bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian disertai tahap pembangunan melalui kebijakan pemerintah yaitu penetapan upah minimum dan aturan wajib belajar 13 tahun yang dilihat dari rata-rata lama sekolah.

Chenery & Syrquin (1975) menyatakan bahwa struktur perekonomian terdiri dari susunan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah yang secara umum dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier.

Menurut Levitan & Belous (dalam Oktasari & Suradi, 2025) yang menyebutkan bahwasannya upah minimum berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan pelindung pekerja berupah rendah.

Teori *human capital* oleh Becker & Chiswick (1966) menyebutkan bahwa peran modal manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

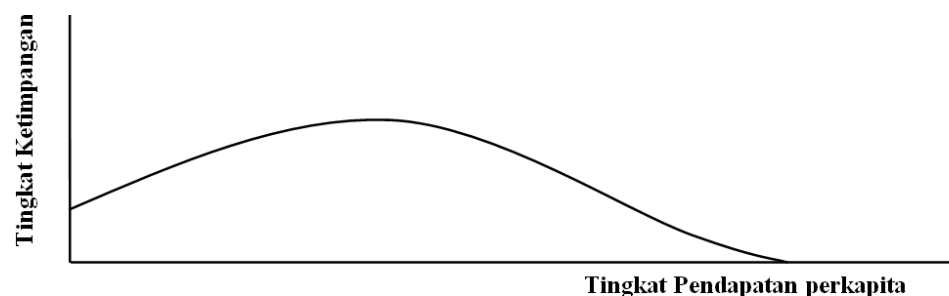
2.1.1.1 Pengertian

Menurut Todaro & Smith (2011), ketimpangan pendapatan diartikan sebagai distribusi yang tidak proporsional pada pendapatan nasional total di berbagai rumah tangga suatu negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat berbeda-beda yang berakibat pada perbandingan pendapatan yang cukup besar antara golongan kaya dan golongan miskin. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan melihat besarnya nilai rasio gini. Rasio gini diartikan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan yang nilainya 0 (terjadi pemerataan sempurna) sampai 1 (terjadi ketimpangan sempurna).

Menurut Sjafrizal (dalam Novia & Utomo, 2022) kegiatan ekonomi suatu daerah terdapat keadaan yang umum terjadi seperti ketimpangan antardaerah yang awalnya terjadi akibat dari perbedaan terhadap kondisi demografi dan perbedaan sumber daya alam pada masing-masing wilayah. Hal ini biasanya memicu daerah yang wilayahnya relatif maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*) dalam proses pembangunan di daerah. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam masalah kemiskinan di suatu wilayah yang harus diperhatikan terus karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan sebuah ukuran kemiskinan relatif. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.

2.1.1.2 Teori

Teori Kuznetz S (1955) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi pada tahap awal akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, setelah perubahan struktur ekonomi berjalan dengan sempurna, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan menurun. Kuznetz juga menyatakan bahwa pendapatan di sektor industri dan jasa bukan hanya tinggi tetapi juga tidak merata sehingga ketika pertumbuhan ekonomi mengarah pada semakin besarnya peran kedua sektor tersebut maka akan terjadi perbedaan distribusi pendapatan yang semakin memburuk atau semakin timpang. Akan tetapi ketika perekonomian mencapai level yang paling tinggi maka akan terjadi redistribusi pendapatan melalui transfer pendapatan kepada faktor produksi dalam proses pembangunan melalui kebijakan upah dan rata-rata lama sekolah sehingga distribusi akan semakin membaik. Konsep yang dikemukakan oleh Kuznetz tersebut selanjutnya dikenal luas dengan nama konsep kurva Kuznetz U terbalik sebagai berikut:



Sumber: S Kuznetz

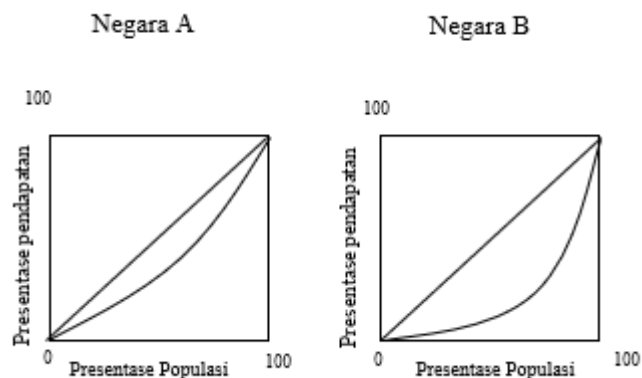
Gambar 2. 1
Kurva Kuznet

2.1.1.3 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Menurut Ivanovi Sulistyaningrum et al. (2022), terdapat beberapa indikator untuk mengukur merata atau tidaknya ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu:

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan grafik yang menggambarkan ukuran dari perbedaan distribusi pendapatan masyarakat dari pemerataan sempurna. Selain itu, kurva ini juga menggambarkan hubungan antara persentase jumlah penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima. Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), maka dapat diartikan semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Berikut ini gambar kurva lorenz:



Sumber: Ruangguru

Gambar 2. 2

Kurva Lorenz

b. Rasio Gini

Rasio gini adalah ukuran yang paling sering dipakai untuk menilai derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara individu maupun rumah tangga dibandingkan kondisi pemerataan

sempurna. Nilai indeks ini berada pada rentang 0 hingga 1, dimana nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan antar anggota masyarakat semakin besar. Berikut tabel indikator rasio gini:

Tabel 2. 1 Kategori Rasio Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 – 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

2.1.1.4 Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Menurut Marti'ah (2025), terdapat delapan faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan disuatu daerah sebagai berikut:

1. Jika pertumbuhan penduduk meningkat secara signifikan mengakibatkan pendapatan perkapita menurun.
2. Inflasi dimana pemasukan moneter meningkat, yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi barang-barang.
3. Pembangunan yang tidak merata antar wilayah.
4. Investasi proyek padat modal yang tinggi.
5. Pergerakan sosial yang minimum.
6. Penerapan garis haluan impor berdampak pada naiknya harga barang hasil industri guna melindungi perusahaan-perusahaan kapitalis.
7. Rendahnya *kurs* mata uang.
8. Rusaknya industri Rumah tangga.

2.1.2 Struktur Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian

Chenery & Syrquin (1975) menyatakan bahwa struktur perekonomian merupakan susunan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah yang secara umum dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier.

Fisher (1935) (dalam Sukirno, 2006) mengelompokkan struktur ekonomi menjadi tiga sektor utama yaitu:

- a). Sektor primer, terdiri dari subsektor pertanian, pertambangan dan penggalian.
- b). Sektor sekunder, terdiri dari subsektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih serta konstruksi.
- c). Sektor tersier, terdiri dari subsektor perdagangan, hotel, dan restoran, subsektor pengangkutan dan komunikasi, subsektor keuangan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lainnya.

Harmini (dalam Novalia, 2014) menyebutkan perbedaan kontribusi antar sektor primer, sekunder, dan tersier dapat menggambarkan perbedaan dominasi masing-masing sektor. Struktur ekonomi suatu provinsi pada dasarnya dapat ditelaah atau diukur dari nilai moneter seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi di suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu. Badan Pusat Statistik (2020) mengelompokkan lapangan usaha atau sektor ekonomi terdiri atas tujuh belas sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2)

Pertambangan dan Penggalian, (3) industri pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (6), Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12) Real Estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa Lainnya.

Menurut Indartini et al. (2021), rumus perhitungan kontribusi sektoral sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Sektor}_{it} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor}_{it}}{\text{Total PDRB}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Sektor i = sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier

t = Tahun

2.1.2.2 Teori - Teori

Seperti yang pernah dikemukakan oleh Kuznetz S (1955) bahwa ketimpangan merupakan fungsi dari kontribusi sektor-sektor terhadap total output. Kontribusi tersebut merupakan persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tertentu terhadap total output atau PDRB di suatu wilayah dengan bentuk persamaan:

$$G = f(X_A, X_B) \dots \dots \dots (2.1)$$

Variabel X_A dan X_B merupakan kontribusi dari sektor pertanian dan sektor non-pertanian, dan G menunjukkan ukuran ketimpangan pendapatan indeks

gini. Dastidar (dalam Novalia, 2014) mengembangkan model tersebut dengan mengelompokan sektor-sektor menjadi tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa, sehingga persamaan di atas menjadi:

$$G = f(X_A + X_I + X_S) \dots \dots \dots (2.2)$$

Variabel X_A , X_I , X_S masing-masing adalah kontribusi dari sektor pertanian, industri, dan jasa dalam total output dan jumlah dari ketiga sektor tersebut adalah 100 persen yang dapat dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$X_A + X_I + X_S = 100\% \dots \dots \dots (2.3)$$

Teori transformasi ekonomi Fei & Ranis (1964) menyatakan bahwa pada negara berkembang, umumnya arah transformasi struktur ekonomi diawali dari perekonomian yang bersifat subsisten yang mengandalkan sektor pertanian beralih menuju ke sektor perekonomian industri. Ketika sumber daya tumbuh, terutama terjadi dari sisi tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian yang kurang produktif ke sektor manufakturing dan jasa yang lebih produktif, perekonomian akan tumbuh dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Namun, dampaknya terhadap ketimpangan pada dasarnya tergantung pada sejauh mana partisipasi dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semakin besar peran sektor modern yang mampu menyerap tenaga kerja berlebih dari sektor pertanian, semakin besar peluang untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, bila transformasi struktur ekonomi

tidak diikuti perpindahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, ketimpangan cenderung bertahan atau bahkan meningkat.

Menurut Rahardjo (2013), teori transformasi struktur perekonomian merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dimana setiap sektor mengalami perubahan yang berbeda. Dalam proses pembangunan, perubahan struktur ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian produksinya mengalami penambahan yang lebih lambat dibanding penambahan produksi nasional sedangkan sektor industri dan jasa mengalami tingkat pertumbuhan produksi lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan produksi nasional.

Kerangka teori neoklasik (dalam Amalia & Utomo, 2024) ketika surplus tenaga kerja dari sektor pertanian berhasil dialihkan dan diserap oleh sektor industri yang lebih produktif, kesenjangan antar wilayah berpotensi menurun. Proses ini mencerminkan redistribusi sumber daya ekonomi dari sektor pertanian yang kurang efisien menuju sektor industri yang lebih efisien, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

2.1.3.1 Pengertian

Menurut Ivanovi Sulistyaningrum et al. (2022), Upah merupakan bentuk macam-macam pembayaran berdasarkan timbul dari kontrak kerja, terlepas dari pekerjaan dan denomisasinya. Upah juga diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh pekerja berupa imbalan pekerjaan yang telah dilakukannya. Pemberian upah baik dalam bentuk uang tunai maupun

uang digital. Upah minimum meredistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah. Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah sebagai batas bawah berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun dan dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak serta data ekonomi wilayah. Tujuan utama dilakukannya penetapan upah yaitu untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah untuk memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Rumus perhitungan upah dan persentase kenaikan upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sebagai berikut:

$$UMP_n = UMP_t \times \{INF_t + (\Delta PDB_t \times \alpha)\}$$

Keterangan:

UMP_n : Upah minimum provinsi yang akan ditetapkan

UMP_t : Upah minimum provinsi tahun berjalan

INF_t : Inflasi tahun berjalan

ΔPDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan

α (alfa) : Indeks yang ditentukan dewan upah daerah (0,5-0,9)

Sedangkan, rumus laju pertumbuhan UMP sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan } UMP_t = \frac{UMP_t - UMP_{t-1}}{UMP_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

UMP_t = Upah minimum provinsi tahun berjalan

UMP_{t-1} = Upah minimum provinsi tahun sebelumnya

2.1.3.2 Teori – Teori

Menurut Borjas (2020), teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) dinyatakan bahwa peningkatan upah akan meningkatkan produktivitas pekerja. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan mengapa perusahaan sulit untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Ketika perusahaan melakukan pengurangan upah untuk melakukan efisiensi biaya produksi, keputusan tersebut juga akan mendorong menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Adanya teori upah efisiensi ini karena:

1. Upah akan memengaruhi nutrisi. Upah yang memadai akan membuat pekerja lebih bernutrisi dan lebih sehat sehingga meningkatkan produktivitas.
2. Upah yang tinggi akan mengurangi perputaran tenaga kerja. Para pekerja keluar dari pekerjaannya karena berbagai alasan untuk menerima upah dan posisi yang lebih baik. Semakin besar upah dibayar semakin besar peluang pekerja untuk tidak beralih ke perusahaan lain, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja baru.
3. Kualitas rata-rata tenaga kerja bergantung pada upah yang dibayarkan. Jika perusahaan mengurangi upah, maka pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan di tempat lain. Skema upah yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas pekerja dan dapat bertindak sebagai tangan tak terlihat

untuk secara sistematis menarik jenis pekerja yang tepat (penyortiran kualitas).

4. Upah yang tinggi akan meningkatkan upaya pekerja. Perusahaan tidak selalu bisa memantau upaya pekerja, dan para pekerja memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras.

Teori ekonomi tenaga kerja yang dikemukakan oleh Levitan & Belous (dalam Oktasari & Suradi, 2025) yang menyebutkan bahwasannya upah minimum berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan pelindung pekerja berupah rendah. Dengan demikian, upah minimum tidak hanya menjadi pelindung bagi pekerja berpenghasilan rendah, tetapi juga berperan penting dalam membantu menciptakan keadilan ekonomi.

Menurut Hugh Rockoff (1984) (dalam Nurain & Juliannisa, 2022) dijelaskan terkait teori Kontrol Harga yang menyatakan bahwa pemberlakuan upah minimum bertujuan demi adanya peningkatan pendapatan pada golongan pekerja miskin yang bekerja di pasar.

2.1.4 Rata-rata Lama Sekolah

2.1.4.1 Pengertian

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2024). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuat seseorang lebih mudah guna memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatannya. Pendapatan yang

lebih tinggi dapat membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih baik dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Oktasari & Suradi, 2025).

Rumus perhitungan RLS Menurut BPS 2024 sebagai berikut:

$$RLS = \frac{TTS\ 15\ +}{Jumlah\ penduduk\ 15\ +}$$

Keterangan:

TTS 15+ = Total tahun sekolah semua penduduk usia 15 tahun ke atas

Jumlah penduduk 15+ = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

2.1.4.1 Teori - Teori

Teori *human capital* oleh Becker & Chiswick (1966) menyebutkan bahwa peran modal manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut Todaro & Smith (2011) mengemukakan mengenai pendidikan sebagai tujuan pembangunan yang mendasar, dimana pendidikan berperan sangat penting dalam pembentukan keahlian suatu negara sebagai upaya penyerapan teknologi modern dan sebagai pengembangan kapasitas demi terwujudnya pertumbuhan serta

pengembangan berkelanjutan. Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani, sehingga rata-rata lama sekolah dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun Pendidikan yang dijalani oleh penduduk di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula mutu sumber daya manusianya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ike Sugiarti, Rendra Erdkhadifa (2023) Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021	Rata-Rata Lama Sekolah, Data Panel	Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, lokasi penelitian	Indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka serta rata-rata pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Sementara faktor jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak Signifikan.	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 5 No. 5 (2023) 2427-2441 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/Alkhar aj.V5i5.3498
2.	Kasman Karimi, Pertiwi Mulyani, Neng Murialti, Tibrani (2023) Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran, Dan	Upah Minimum	Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran, Data Time Series	Penanaman modal asing, indeks persepsi korupsi, kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif signifikan sedangkan upah minimum berpengaruh negatif signifikan.	Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, Vol. 13 No. 1, Juni 2023

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia				
3.	Nur Iman Hakim Al Faqih, Siti Alfidhatun (2025) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa	PDRB Sektoral Primer, Sekunder, Tersier, Data Panel	Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi berpengaruh positif dan signifikan, PDRB sektor sekunder berpengaruh negatif signifikan, PDRB sektor primer, PDRB sektor tersier, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.	<i>Journal Of Management, Economics, And Entrepreneur</i> Volume 4, Nomor 1, Juni 2025 E-ISSN: 2964- 0407
4.	Hikmah Nurain, Indri Arrafi Juliannisa (2022) Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan Pada Lima Provinsi Tertimpang di Indonesia	Upah Minimum Provinsi, Data Panel	IPM, Belanja Modal Pemerintah Provinsi	Indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan realisasi belanja modal pemerintah provinsi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh.	Equilibrium: Jurnal Ekonomi- Manajemen- Akuntansi Volume 18, Nomor 1, April 2022. Hal. 53-65
5.	Diana Wijayanti, Ismayana Dwi Nanda Putri (2023) Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2017- 2022	Upah Minimum Provinsi, Data Panel	Indeks TIK	UMP berpengaruh negatif sedangkan Indeks TIK berpengaruh positif signifikan Sementara itu, PDRB dan IPM tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan, Volume 2 Issue 2, 2023: 126-134
6.	Sri Indriyani S Dai, Syarwani Canon, Devi Oktaviani Bauty (2023) Analisis Pengaruh RLS, Pengeluaran Perkapita, UHH, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di KBI Dan KTI	Rata-Rata Lama Sekolah, Data Panel	Pengeluaran Perkapita; UHH; Tingkat Kemiskinan	Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan, pengeluaran perkapita dan umur harapan hidup berpengaruh negatif signifikan, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif tidak signifikan.	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 1, Januari 2023 E-Issn : 2599- 3410 P-Issn : 2614-3259

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Naflah Azmi Nur Aisyah, Sishadiyati (2024) <i>Dinamika Ekonomi Surabaya Raya: Studi Tentang Dampak PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Surabaya Raya</i>	Upah Minimum, Data Panel	PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan, lokasi penelitian	PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Tingkat kemiskinan dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan	Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi ISSN Online: 2549-2284 Volume 09 Nomor 01 Desember 2024
8.	Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo (2024) <i>Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia</i>	PDRB Sektor Industri, PDRB Sektor Jasa, Data Panel	Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan	Variabel rasio PDRB sektor industri dan Upah Minimum Provinsi menunjukkan pengaruh negatif. Rasio PDRB sektor jasa, Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Sosial Pangan, tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Jambura Economic Education Journal</i> Volume 6 No. 2 July Tahun 2024. <i>E-ISSN: 2656-4378 P-ISSN: 2655-5689 Journal Homepage: https://ejurnal.unng.ac.id/index.php/Jej/index</i>
9	Burhan Asril Jabani, Bambang Juanda, Sri Mulatsih (2024) <i>Pengaruh Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara</i>	Sektor Industri, Sektor Jasa, Data Panel	Pertumbuhan ekonomi	PDRB sektor sekunder berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sementara PDRB sektor tersier dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Journal of Regional and Rural Development Planning</i> (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Oktober 2024, 8 (3): 213-225
10.	Dian Nora Herlina, Hari Winarto, Bagus Adhitya, Heris Kencana, Agus Prabawa (2022) <i>Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia</i>	Sektor Primer, Sekunder, Tersier	Perbedaan Lokasi Penelitian, <i>time series</i>	PDRB sektor primer berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, PDRB sektor sekunder berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia,	Majalah Ilmiah Manajemen & Bisnis Vol 19 No 1, Pp 25-34P-ISSN : 1411-1977 & E-ISSN 2809-6754

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				sementara PDRB sektor tersier tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.	
11.	Herlin Oktasari, Romi Suradi (2025) Pengaruh Upah Minimum, Investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Rata – Rata Lama Sekolah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat	Upah Minimum Dan Rata-Rata Lama Sekolah, Data Panel	Investasi Dan TPAK, lokasi penelitian	Variabel UMK dan investasi memiliki pengaruh negatif serta signifikan. Di sisi lain, variabel TPAK memperlihatkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sementara RLS memberikan pengaruh positif dan signifikan,	<i>MSDI : Management Sustainable Development Journal</i> Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025 Issn (Online) 2657-2036 Issn (Print) 2684-6802
12.	Yolanda Sari, Ahmad Soleh, Wiken Wafiaziza (2021) Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi	Rata-Rata Lama Sekolah, data panel	Jumlah Penduduk Miskin, lokasi penelitian	Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan sedangkan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif signifikan	<i>Journal Development</i> Pissn: 2338-6746 Eissn: 2615-3491 VOL.9 NO.2 Desember 2021
13.	Berliana Ivanovi Sulistyaningrum, Dr. Ardito Bhinadi, S.E, M.Si, Rini Dwi Astuti, S.E, M.Si (2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi- Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020	Upah Minimum Provinsi, Data Panel	Pertumbuhan Ekonomi, IPM,	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.	Sinomika Jurnal Volume 1 No.4 (2022)
14.	Fabella Aprilia Duarsa, Riko Setya Wijaya (2023)	Rata-Rata Lama Sekolah, data panel	AHH, dan Jumlah Penduduk,	Pengeluaran Perkapita dan jumlah	Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, RLS, AHH, dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia		pengeluaran Perkapita	penduduk berpengaruh negatif Signifikan, Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh Positif tidak signifikan, Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan	Pendidikan Ekonomi Vol. 8, No 2, 203
15.	Pramudya Kusuma Dewa, Yuni Prihadi Utomo (2025) Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Provinsi Pulau Jawa 2018-2023	Sektor Primer, data panel	Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, PDRB	Sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan	<i>COSTING: Journal Of Economic, Business And Accounting</i> Volume 8 Nomor 3, Tahun 2025 E-ISSN : 2597-5234
16.	Dessie Yuliana dan Rosyadi (2025) Pengaruh PDRB Sektoral, Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat	Sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier	Jumlah penduduk, investasi, IPM, <i>time series</i>	Jumlah penduduk, sektor pertanian, industri, dan jasa memiliki pengaruh negatif signifikan sedangkan investasi dan IPM tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Journal of Economics and Business UBS</i> Vol. 14 No. 1 Januari-Februari 2025
17.	Rima Astary, Natasya Safitri, Zarpani, Erni Febrina Harahap (2024) Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.	Upah Minimum Provinsi	Investasi, pengeluaran pemerintah, inflasi, <i>time series</i>	variabel investasi, UMP dan inflasi berpengaruh positif signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia	Jurnal Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume X No. 1 – April 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk menyederhanakan fenomena yang diangkat serta keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam tinjauan pustaka.

2.3.1 Hubungan Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Teori Kuznetz S (1955) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi pada tahap awal akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, setelah perubahan struktur ekonomi berjalan dengan sempurna dan diiringi dengan proses pembangunan, maka tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan menurun yang digambarkan dengan kurva hipotesis kuznet dengan bentuk U terbalik. Hermawan & Taher (2025) menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal kurva kuznet dimana perubahan struktur ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, struktur perekonomian dengan kontribusi sektor primer berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan karena produktivitasnya rendah (Dewa & Utomo, 2025). Sektor sekunder berpengaruh positif karena sektor sekunder cenderung bergerak pada industri padat modal sehingga batas antara si kaya dan si miskin akan semakin lebar dengan demikian yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Herlina et al., 2022). Sektor tersier berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan karena sektor jasa yang berkembang adalah jasa informal yang tidak begitu produktif dan upah yang rendah. Tenaga kerja sektor pertanian yang minim pendidikan yang tidak terserap pada sektor industri bermigrasi ke sektor jasa informal yang tidak begitu memperhatikan kualifikasi pendidikan (Jabani et al., 2024).

2.3.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Menurut Levitan & Belous (dalam Oktasari & Suradi, 2025) yang menyebutkan bahwasannya upah minimum berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan pelindung pekerja berupah rendah.. Upah minimum provinsi bertujuan untuk melindungi pekerja dengan upah batas minimum yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Di satu sisi, upah minimum provinsi dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memastikan bahwa pekerja dengan upah rendah mendapatkan kompensasi yang layak. Kenaikan upah yang ditetapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat yang dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa di suatu daerah yang akan membuat ketimpangan menjadi lebih rendah antara daerah lain ketika perekonomian daerah cenderung membaik (Karimi et al., 2023). Oleh karena itu, kenaikan upah minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Ivanovi S,2022); (Oktasari & Suradi, 2025); (Oktasari & Suradi, 2025); (Karimi et al., 2023); (Wijayanti & Putri, 2023).

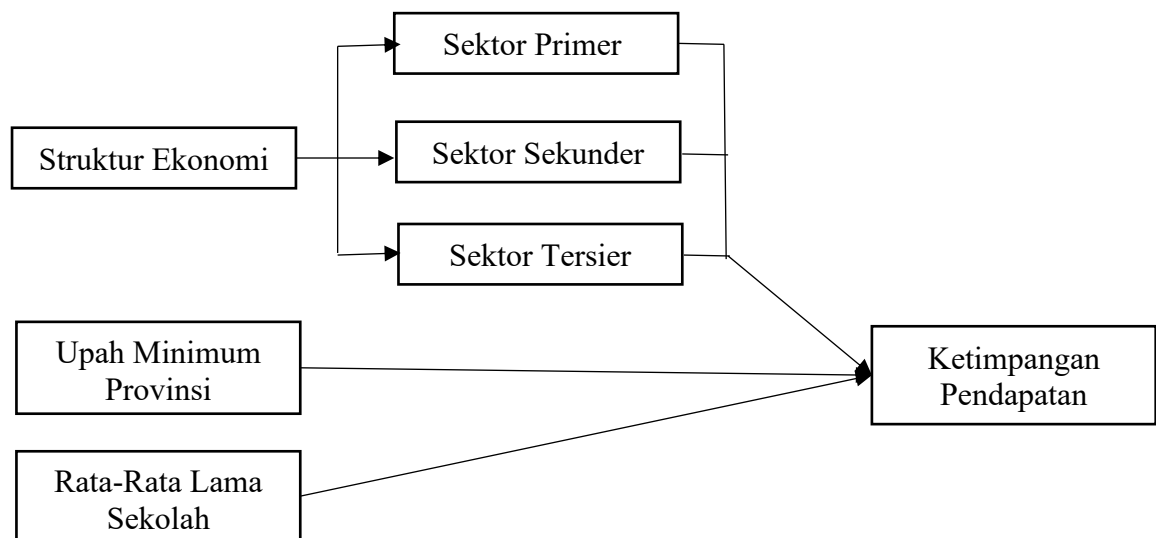
2.3.3 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Teori *human capital* oleh Becker & Chiswick (1966) menyebutkan bahwa peran modal manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini

menghubungkan langsung perbedaan RLS antar provinsi dengan perbedaan kemampuan penduduk dimana tenaga kerja yang produktif serta memiliki kualitas yang mumpuni akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan kemudian dalam jangka panjang akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Maka, dapat diasumsikan bahwa rata-rata lama sekolah seseorang penduduk dapat mengurangi ketimpangan pendapatan jika diiringi dengan produktivitas yang sesuai pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dengan demikian, RLS berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan seperti hasil studi oleh (Sari et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga secara parsial kontribusi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan delapan provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia tahun 2015-2024.
2. Diduga secara simultan kontribusi sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan delapan provinsi ketimpangan tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2024.